

# DAFTAR ISI

H a l

❖	Kata Pengantar .....	vii
I.	UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA.	
1.	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi .....	1
	• BAB I : KETENTUAN UMUM .....	2
	• BAB II : ASAS DAN TUJUAN .....	3
	• BAB III : USAHA JASA KONSTRUKSI .....	4
	• BAB IV : PENGIKATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI .....	8
	• BAB V : PENYELENGGARAAN PEKERJAAN - KONSTRUKSI .....	14
	• BAB VI : KEGAGALAN BANGUNAN .....	15
	• BAB VII : PERAN MASYARAKAT .....	16
	• BAB VIII : PEMBINAAN .....	19
	• BAB IX : PENYELESAIAN SENGKETA .....	20
	• BAB X : SANKSI .....	22
	• BAB XI : KETENTUAN PERALIHAN .....	23
	• BAB XII : KETENTUAN PENUTUP .....	24
2.	Penjelasan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi .....	25
3.	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta Dalam Pembangunan dan atau pengelolaan Infrastruktur .....	65
4.	Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1998 tanggal 12 Januari 1998 .....	74

I. PENENTUAN PROYEK KERJASAMA DAN PEMILIHAN PIHAK SWASTA.....	74
II. PRAKUALIFIKASI .....	77
III. DOKUMEN LELANG .....	80
IV. PENOLAKAN ATAS PENAWARAN .....	85
V. PENYEDERHANAAN PENAWARAN KOMPETITIF .....	86
VI. PROSEDUR PEMBERITAHUAN KEPADA PENAWAR .....	88
VII. MONITORING DAN EVALUASI .....	89
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1998 Tentang Tim Evaluasi Dalam Rangka Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta proyek dan kegiatan kerjasama Pemerintah dan Swasta di Bidang Infrastruktur .....	91
<b>II. PELAKSANAAN DAN PEMBUATAN DAFTAR PENGADAAN BARANG DAN JASA.</b>	
6. Surat Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 59/MK. WASBANGPAN/6/98 tertanggal 1 Juni 1998 Perihal Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah .....	103
7. Surat Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan Pengawasan Pembangunan Nomor : S-77/M.EKKU/1997 tertanggal 15 Mei 1997 Perihal Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah .....	109
8. Lampiran Petunjuk Pengisian formulir Laporan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 1996/1997 dan 1997/1998 .....	112
9. Surat Edaran Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : <u>2061/D.VI/4/1997</u> tertanggal 10 April 1997 Perihal : <u>SE-47/A/21/0497</u> Pembuatan daftar pengadaan barang dan jasa bagi PK dan Koperasi (GEL) .....	149

10. Lampiran Surat No.2061/D.VI/4/1997 tanggal 10 April 1997  
SE-47/A/21/0497  
 Perihal : Petunjuk Penyusunan Daftar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bagi GEL dalam Pelaksanaan Keppres No. 16 Tahun 1994 jo Keppres No. 24 Tahun 1995 ..... 151

### III. KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KETUA BAPPENAS.

11. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor : 185/KMK.03/1995 - Nomor : Kep. 031/KET/5/1995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan, dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ..... 159
12. Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Nomor : SE-45/A/45/0396 dan Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri Nomor : SE-050.1/903/PUOD Tanggal 25 Maret 1996 Tentang Penyediaan dan Penyaluran Dana Bantuan Pembangunan Dati I dan Dati II ..... 189

### IV. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1996 Tentang Tim Penelitian Proyek-proyek Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara ..... 203

